



PEMKAB
MAJALENGKA

BerAKHLAK
Berakhlak Berprestasi Berkeadilan Berkebhinekaan
Berkeadilan Berprestasi Berkeadilan Berkebhinekaan

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023



KECAMATAN PANYINGKIRAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

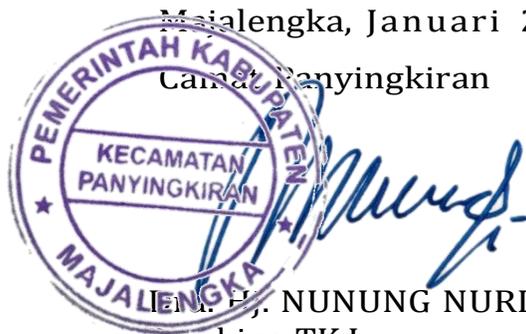
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Kecamatan Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2023.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Raharja. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya. Kami terus beradaptasi dan berinovasi demi menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat Majalengka.

Majalengka, Januari 2024

Camat Panyingkiran



N. P., NUNUNG NURLAELA, M.Si.
Pembina TK.I
NIP. 19660516 199203 2 007

Diketahui oleh,	
Sekretaris	
Kasi Pem YanUM	
Kasi Kesos	
Kasi Trantib	
Kasi PPM	



KATA PENGANTAR



DAFTAR ISI



BAB I PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM
DATA KEPEGAWAIAN
ISU STRATEGIS
SISTEMATIKA PELAPORAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS
PERKIN 2023
RENCANA ANGGARAN 2023



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

PENGUKURAN KINERJA 2023
ANALISIS CAPAIAN KINERJA
AKUNTABILITAS KEUANGAN

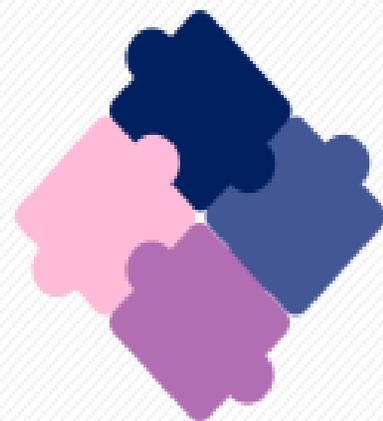


BAB IV PENUTUP



LAMPIRAN

Daftar Isi



BAB 1

PENDAHULUAN

Gambaran Umum

Data Kepegawaian

Isu Strategis

Sistematika Pelaporan

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan yang dimaksud dengan Pelaporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, Pelaporan Kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*, Laporan Kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai bukti akuntabilitas kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Panyingkiran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan indikator yang telah ditentukan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan.

1.1 GAMBARAN UMUM KECAMATAN PANYINGKIRAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Kecamatan adalah merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di

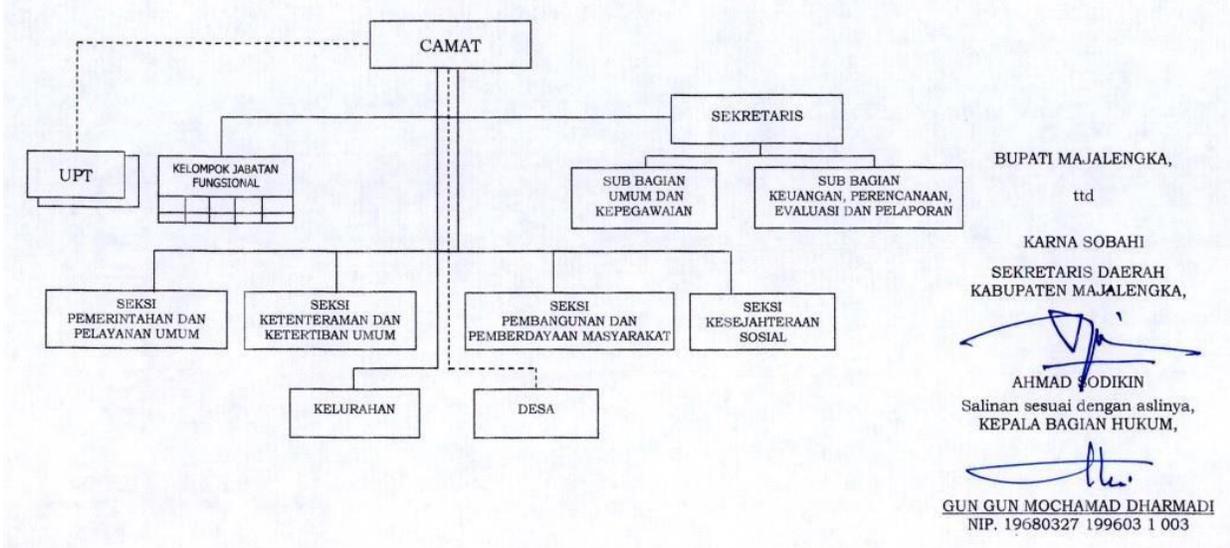
Kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan.

Tugas pokok Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan keteruban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 45 Tahun 2019
 TANGGAL : 23 Desember 2019
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
 KABUPATEN MAJALENGKA



1.2 DATA KEPEGAWAIAN

Untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka didukung oleh sumber daya sebagai berikut:

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2023 berjumlah.....orang dengan rincian sebagai berikut:



1.3 ISU STRATEGIS

Isu Startegis Kecamatan Panyingkiran adalah:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Harapan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Keamatan Panyingkiran adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Panyingkiran.
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat. Tugas Kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga bisa meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi unggulan desa, Dengan semakin berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang berbanding terbalik dengan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kecamatan Panyingkiran yang semakin lama semakin menghilang, diantaranya semangat kebersamaan dan gotong royong, maka kecamatan dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa. Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka salah satu fungsi kecamatan yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama stakeholders lain, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa, sehingga dapat menjalankan pemerintahan desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 dan meningkatnya status kemajuan kemandirian desa.
4. Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana prasarana Infrastruktur Perdesaan
5. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di Masyarakat.

Kecamatan Panyingkiran termasuk Kawasan PKL (Pusat Kegiatan Lokal). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Selain itu juga Kecamatan Panyingkiran akan di jadikan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian, dan pengembangan kawasan wisata. Supaya fungsi pelayanan tersebut dapat sama-sama berkembang, dan kehadiran kegiatan komersial dan pengembangan pariwisata dapat dikendalikan, maka dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama pihak terkait lain (Polsek dan Koramil), serta dengan lebih meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, diharapkan dapat memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan perundang-undangan sehingga tercipta kondusifitas di wilayah Kecamatan Panyingkiran.

1.4 SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Panyingkiran Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terjadi dari visi misi, tujuan, sasaran dan perjanjian kinerja tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya

LAMPIRAN

Lampiran ini berisi perjanjian kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan yang telah dipublikasikan, Dokumentasi Penyerahan LKIP kepada Kepala Daerah, Bukti Penyebaran LKIP kepada Perangkat Daerah

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

RENSTRA

PERKIN 2023

Rencana Anggaran 2023

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panyingkiran Tahun 2018-2023 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023. Pada Renstra Perubahan terdapat 5 program.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM

Kerangka perumusan tujuan dan sasaran dalam RENSTRA Kecamatan Panyingkiran Tahun 2018-2023 tentunya mengacu pada RPJMD Kabupaten. Majalengka Tahun 2018-2023.

Hal ini dilakukan agar terwujud sinkronisasi antara pembangunan di Kecamatan Panyingkiran dan pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Perubahan Tujuan Kecamatan Panyingkiran

Tujuan (2018-2023)	Tujuan (Hasil Review)
Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik

Perubahan Sasaran Kecamatan Panyingkiran

Sasaran (2018-2023)	Sasaran (Hasil Review)
Pengurangan Tingkat Kemiskinan	Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas

Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat	
Meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi Unggulan	
Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	

Perubahan Indikator Kinerja Kecamatan Panyingkiran

Indikator Kinerja (2018-2023)	Indikator Kinerja (Hasil Review)
Persentase penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat
Persentase Penanganan gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum Skala Kecamatan	
Peningkatan Wawasan Kebangsaan	
Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	
Capaian Sakip Perangkat Daerah	
Capaian SKM Perangkat Daerah	
Persentase Pemenuhan Penunjang Perkantoran	
Indeks Kepuasan Masyarakat	

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Renstra Tahun 2018-2023 tidak mengalami perubahan, berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) selama lima tahun:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan					Target Setelah Perubahan
					2019	2020	2021	2022	2023	2023
	Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor	Pengurangan Tingkat Kemiskinan	Persentase penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	
	Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat	Persentase Penanganan gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum Skala Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	
			Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	100	100	100	100	
	Meningkatkan ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa	Meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi Unggulan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	
	Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	10	10	10	10	10	
	Terwujudnya Akuintabilitas Kinerja	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Predika t	BB	BB	BB	BB	BB	
			Capaian SKM Perangkat Daerah	Predika t	B	B	BB	B	B	
			Persentase Pemenuhan Penunjang Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai						83,93 (sesuaikan dengan perkin perubahan 2023)

Perjanjian Kinerja Kecamatan Panyingkiran Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KECAMATAN PANYINGKIRAN			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Situasi dan Kondisi yang Aman, Tenteram dan Tertib di Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Skala Kecamatan	90 - 100 %
		Peningkatan Wawasan kebangsaan	90 - 100 %
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Capaian Sakip Perangkat Daerah	BB Nilai
		Capaian SKM Perangkat Daerah	B Nilai
		Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	90 - 100 %
		Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik ditingkat kecamatan	90 - 100 %
3.	Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	5 - 10 %
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	90 - 100 %

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 KECAMATAN PANYINGKIRAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,93 Nilai

2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkan Rencana Anggaran Tahun 2023 yang terdiri dari:

RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 0,00	APBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 42.110.000,00	APBD
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.134.811.352,00	APBD
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 20.000.000,00	APBD
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 85.415.000,00	APBD
JUMLAH		Rp 2.282.336.352,00	

RENCANA ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 KECAMATAN PANYINGKIRAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,93 Nilai

Program	Anggaran	Keterangan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 1.794.508.447,00	APBD
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 70.000.000,00	APBD
3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 6.000.000,00	APBD
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 21.320.000,00	APBD
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 85.415.000,00	APBD
JUMLAH	Rp 1.977.243.447,00	

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja 2023

Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas Keuangan

Capaian kinerja Dinas/Badan/Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Renstra. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Dinas/Badan/Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 rata-rata sebesar 100%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :

Capaian IKU

100

IKU :

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	83,93	83,93	100%

3.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR 1

IKM (INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT)

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	83,93	83,93	100%

Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Panyingkiran Tahun 2023 adalah 83,93 dengan kategori BAIK.

Capaian IKM Kecamatan Panyingkiran sebesar 100%, hal ini dapat dilihat dari realisasi sebesar 83,93 dari targetnya 83,93

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	83,93	82,13	Kenaikan 1,08 %

Realisasi tahun 2023 dan 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,08 nilai.

Jika dibandingkan realisasi IKM Tahun 2023 dengan Tahun 2022, mengalami peningkatan nilai IKM sebesar 1,08, dimana nilai IKM Tahun 2023 sebesar 83,93 dan Tahun 2022 sebesar 82,13.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	100%	100%	

Capaian kinerja tahun 2023 dan 2022 sebesar 100%

Sedangkan jika melihat capaian tahun 2023 dengan tahun 2022, capaiannya masih sama 100%.

3. Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	83,93	85	99,54%

Target akhir Renstra sebesar 85 sedangkan realisasi sebesar 83,93. Sehingga IKM Kecamatan Panyingkiran baru bisa mencapai 99,54%

4. Perbandingan Realisasi 2023 dengan nilai Pemerintah Kabupaten

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Rata-rata Provinsi/ Nasional	Hasil Perbandingan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	83,93	83,26	0,67

Jika Nilai IKM Kecamatan Panyingkiran dibandingkan dengan nilai IKM Pemerintah Kabupaten Majalengka, maka nilai IKM Kecamatan Panyingkiran lebih tinggi sebesar 0,67. Dimana nilai IKM Kecamatan Panyingkiran sebesar 83,93 sedangkan Nilai IKM Pemerintah Kabupaten Majalengka sebesar 83,26.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan Upaya yang telah dilakukan dan Upaya yang akan dilakukan tahun selanjutnya

a. Faktor Keberhasilan

- Meningkatnya kualitas Pembinaan Masyarakat Tentang Kesos dengan Terbinanya Kader PKK Kecamatan sebanyak 18 orang tentang administrasi PKK
- Pelayanan Administratif tepat waktu dengan Terlayaninya Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Kesos (Rekomendasi Nikah sebanyak 85 dokumen dan Surat Keterangan Tidak Mampu sebanyak 3 dokumen), Terpantauanya lansia yang terlantar sebanyak 36 orang, Terlayaninya permohonan kependudukan (Pencetakan KTP sebanyak 550 lembar, pencetakan KK sebanyak 1.800 lembar,
- surat keterangan ahli waris sebanyak 84 dokumen, pernyataan Domisili Haji sebanyak 5 dokumen, dan Dispensasi camat sebanyak 34 dokumen).
- Meningkatnya kualitas pembinaan Kelurahan/desa dengan Terbinanya Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Pembayaran PBB Dimana realisasi pajak bumi dan bangunan Kecamatan Panyingiran buku 1,2,3 dan 4 masing-masing 100%.
- Meningkatnya kualitas pembinaan masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat dengan Terbinanya desa tentang potensi unggulan desa (Desa Mandiri sebanyak 7 desa, desa maju sebanyak 2 Desa dengan potensi unggulan di bidang pertanian) dan Terbinanya desa tentang UMKM desa sebanyak 13 kelompok.
- Meningkatnya kualitas pengawasan tantribum dengan Disepakatinya upaya bersama dalam mengatasi permasalahan HTAG dan Terpantaunya

potensi gangguan tantribum (ijin rame- rame sebanyak 65 dokumen).

- Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam PHBI dan PHBN
- di tandai dengan ikut sertanya masyarakat dari 9 desa dalam Kegiatan PHBN dan PHBI tersebut
- Meningkatnya kualitas pembinaan Kelurahan/desa dengan Terbinanya Desa Tentang pelaksanaan program Alokasi Dana Desa, Terpilihnya kepala desa sebanyak 1 Desa, Disepakatinya usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang, Terbinanya perangkat desa tentang bidang pemerintahan dan Terbinanya desa melalui lomba desa.
- Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan dengan Tersusunya Dokumen Renja Perangkat Daerah, Tersusunya Dokumen RKA SKPD, Tersusunya Dokumen RKA Perubahan SKPD, Tersusunya DPA, Tersusunya DPA Perubahan, Tersusunya LKIP dan Tersusunya LKPJ.
- Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Tepat Waktu dengan Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN, dan Tersusunya Laporan Keuangan
- Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan dengan Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor, Tersedianya Alat Tulis Kantor, Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah, Tersedianya Makanan dan Minuman, Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah, Tersedianya Mebeler Kantor, Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya, Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Tersedianya layanan Listrik, Air, telpon dan internet, Tersedianya Jasa Keamanan dan kebersihan Kantor, Terpeliharanya kendaraan dinas, Terpeliharanya Mebel, Terpeliharanya Peraltan dan mesinlainnya dan terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

b. Faktor kegagalan

- Letak Geografis
- Masih kurangnya koordinasi dengan OPD lain yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mengungkit potensi unggulan desa di wilayah kecamatan Panyingkiran
- Masih rendahnya penguatan kapasitas kinerja aparatur pemerintahan desa dan kualitas serta kuantitas sarana prasarana infrastruktur perdesaan

c. Upaya yang telah dilakukan

- Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dengan Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, LKIP, LKPJ, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN , Penyusunan Laporan Keuangan, Penyediaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, Penyediaan Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah, Penyediaan Makanan dan Minuman Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah, Penyediaan Mebel Kantor, Penyediaan Peralatan dan mesin lainnya , Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Penyediaan layanan Listrik, Air, telpon dan internet, Penyediaan Jasa Keamanan dan kebersihan Kantor, Pemeliharaan kendaraan dinas, Pemeliharaan Mebel , Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya , Pemeliharaan







- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat dengan Pembinaan desa tentang potensi unggulan desa dan



tentang UMKM desa.

- Meningkatkan kualitas pengawasan tantribum dengan Koordinasi upaya bersama dalam mengatasi permasalahan HTAG dan Pemantauan potensi gangguan tantribum



- Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam penanaman nilai - nilai nasionalisme dengan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam PHBI dan PHBN



- Meningkatkan kinerja desa dengan pembinaan desa tentang pelaksanaan program alokasi dana desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, kegiatan musrenbang, pembinaan perangkat desa tentang bidang pemerintahan, dan pembinaan desa melalui lomba desa.





d. Upaya yang akan dilakukan

- Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dengan Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, LKIP, LKPJ, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyusunan Laporan Keuangan, Penyediaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, Penyediaan Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah, Penyediaan Makanan dan Minuman Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah, Penyediaan Mebel Kantor, Penyediaan Peralatan dan mesin lainnya, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Penyediaan layanan Listrik, Air, telpon dan internet, Penyediaan Jasa Keamanan dan kebersihan Kantor, Pemeliharaan

kendaraan dinas, Pemeliharaan Mebel , Pemeliharaan Peraltan dan mesin lainnya , Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan bidang kesos dan Pemerintahan dengan Pembinaan Kader PKK Kecamatan tentang administrasi PKK, Pelayanan Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Kesos, pemantauan lansia yang terlantar , Pelayanan permohonan kependudukan, Pembinaan Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Pembayaran PBB
- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat dengan Pembinaan desa tentang potensi unggulan desa dan tentang UMKM desa.
- Meningkatkan kualitas pengawasan tantribum dengan Koordinasi upaya bersama dalam mengatasi permasalahan HTAG dan Pemantauan potensi gangguan tantribum.
- Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam penanaman nilai- nilai nasionalisme dengan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam PHBI dan PHBN
- Meningkatkan kinerja desa dengan pembinaan desa tentang pelaksanaan program alokasi dana desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, kegiatan musrenbang, pembinaan perangkat desa tentang bidang pemerintahan, dan pembinaan desa melalui lomba desa.

5. **Program** yang menunjang keberhasilan/kegagalan

No.	Program	Pengampu	Anggaran
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian dan Kasubag KPEP	1.794.509.447,00
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	70.000.000,00
3.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kasi Trantib	6.000.000,00
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kasi Kesejahteraan Sosial	21.320.000,00
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kasi PPM, Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dan Kasi Trantib	85.415.000,00

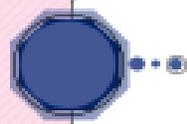
6. **Efisiensi** anggaran jika IKU **mencapai** 100%.

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada sasaran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas yaitu 0,05 % atau sebesar Rp. 107.150.923 dari pagu anggaran Rp1.977.244.447 dengan realisasi Rp 1.870.093.524

3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1	Pelayanan public lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	100%	94,58 %



BAB 4

KESIMPULAN

BAB IV

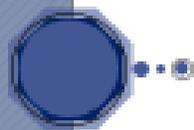
KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kecamatan Panyingkiran Tahun 2023 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan RPJMD, perbandingan dengan Jawa Barat, kendala yang dihadapi, Upaya yang telah dilaksanakan dan Upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian tahun selanjutnya.

Capaian kinerja Kecamatan Panyingkiran pada tahun 2023 sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran Strategis RPJMD yaitu 100% dari IKU sebanyak 1. Hal tersebut karena adanya komitmen dan kolaborasi semua bidang dalam menjalankan tugas.

Kecamatan Panyingkiran pada Tahun 2023 berhasil menggunakan sumber daya sesuai peruntukannya. Efisiensi sumber daya keuangan pada tahun 2023 adalah 0,05 % atau sebesar Rp. 107.150.923

Kecamatan Panyingkiran terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memaksimalkan koordinasi dengan semua bidang dalam menyelenggarakan system Pemerintahan yang akuntabel, berorientasi pada hasil yang berdampak bagi masyarakat.



LAMPIRAN

PERKIN

CASCADING

**BUKTI SEBAR LAKIP KEPADA
SELURUH PEGAWAI DI KECAMATAN**

SK TIM LAKIP





**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RIZKY GINANJAR SATYAGRAHA, S.STP., M.SI.**
Jabatan : Camat Panyingkiran
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**
Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

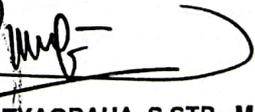
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, Januari 2023

Pihak Pertama,


RIZKY GINANJAR SATYAGRAHA, S.STP., M.SI.
NIP. 19890908 201206 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN PANYINGKIRAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Situasi dan Kondisi yang Aman, Tenteram dan Tertib di Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Skala Kecamatan	90 - 100 %
		Peningkatan Wawasan kebangsaan	90 - 100 %
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Capaian Sakip Perangkat Daerah	BB Nilai
		Capaian SKM Perangkat Daerah	B Nilai
		Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	90 - 100 %
		Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	90 - 100 %
3.	Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	5 - 10 %
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	90 - 100 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 10.000.000,00	APBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 71.000.000,00	APBD
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.134.811.352,00	APBD
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 20.000.000,00	APBD
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 91.525.000,00	APBD
JUMLAH		Rp 2.327.336.352,00	



Bupati Majalengka,

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, Januari 2023

Camat Panyingkiran,

RIZKY GINANJAR SATYAGRAHA, S.STP., M.SI.
NIP. 19890908 201206 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. Hj. NUNUNG NURLAELA, M.Si.**
Jabatan : Camat Panyingkiran
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**
Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, Desember 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Dra. Hj. NUNUNG NURLAELA, M.Si.
NIP. 19660516 199203 2 007

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN PANYINGKIRAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,93 Nilai

Program		Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 1.794.508.447,00	APBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 70.000.000,00	APBD
3.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 6.000.000,00	APBD
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 21.320.000,00	APBD
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 85.415.000,00	APBD
JUMLAH		Rp 1.977.243.447,00	

Majalengka, Desember 2023

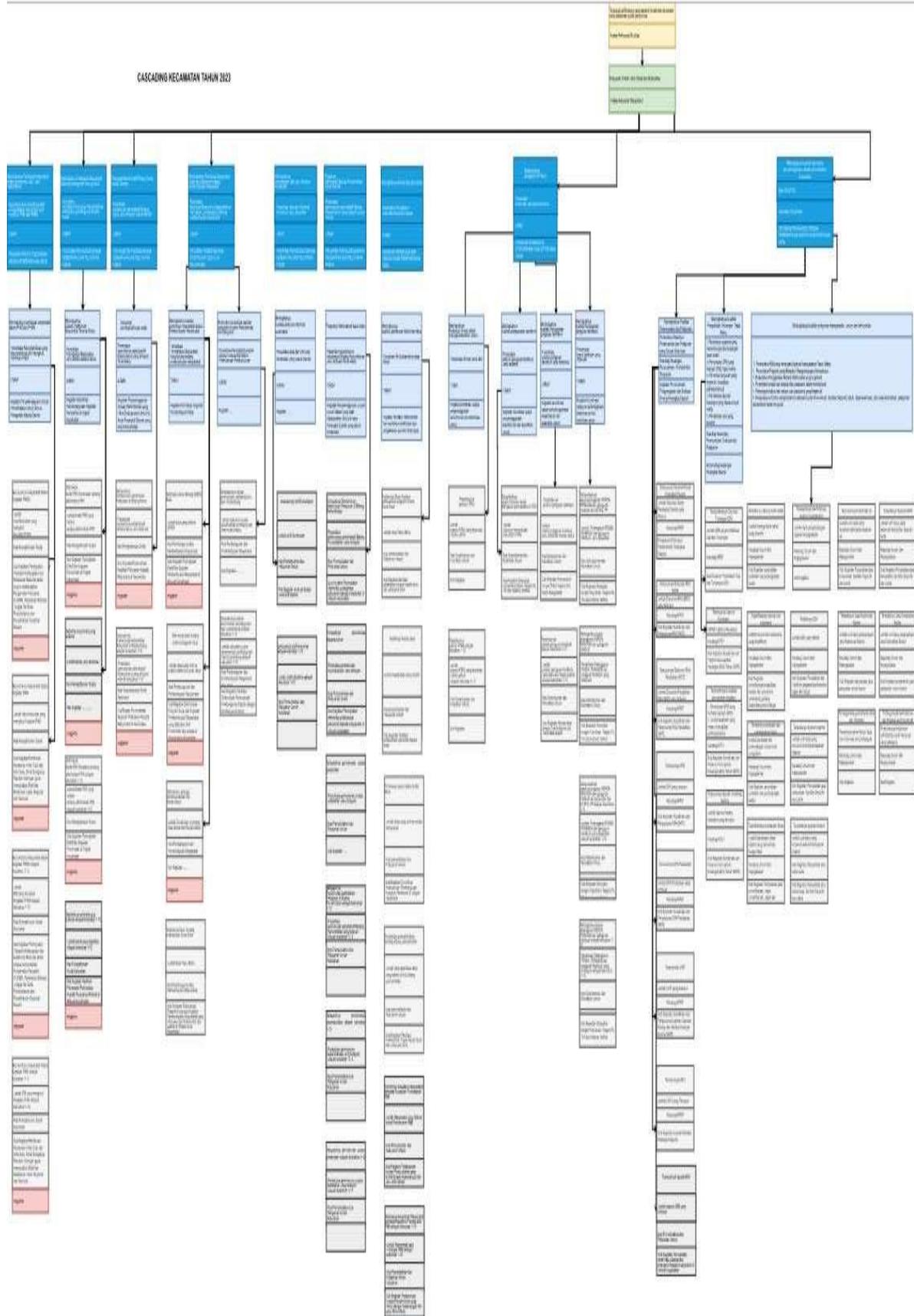
Bupati Majalengka,

Camat Panyingkiran,

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Dra. Hj. NUNUNG NURLAELA, M.Si.
NIP. 19660516 199203 2 007

CASCADEO REKAMATAN TAHUN 2023



PENGUKURAN KINERJA (JANUARI-DESEMBER) TAHUN 2023

KECAMATAN PANYINGKIRAN

No	Kinerja					Anggaran				Deskripsikan secara Rinci Upaya yang Telah Dilakukan
	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	83,93	83,93	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.794.509.447	1.689.578.036	94,15	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, Administrasi keuangan perangkat daerah, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan bahan logistik kantor, Penyediaan barang cetakan dan pengandaan, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	70.000.000	68.476.925	97,82	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.000.000	6.000.000	100,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

No	Kinerja					Anggaran				Deskripsikan secara Rinci Upaya yang Telah Dilakukan
	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.320.000	21.320.000	100,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	85.415.000	84.718.563	99,18	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Panyingkiran, 26 Januari 2024
 An. Camat Panyingkiran
 Sekretaris



Wawan Anwar Sutisna, S.Sos.
 NIP. 19660402 198603 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

KECAMATAN PANYINGKIRAN

Alamat : Jalan Mutiara No. 169 PANYINGKIRAN Kode Pos 45472 Telp. (0233) 510 090

KEPUTUSAN CAMAT PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 04 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KECAMATAN PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023

CAMAT PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi;

b. bahwa agar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dapat menggambarkan akuntabilitas kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Panyingkiran Kabupaten Majalengka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Penetapan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Majalengka;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Majalengka
 11. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Panyingkiran tahun 2023;
- KETIGA : Tim Penyusun LAKIP wajib menindak lanjuti hasil review oleh APIP/Inspektorat agar penyusunan LAKIP memenuhi kriteria andal, transparan dan akuntabel
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panyingkiran

Pada tanggal : 5 Januari 2024

Samat Panyingkiran,



Dra. Hj. NUNUNG NURLAELA, M.Si

Lampiran : Keputusan Camat Panyingkiran
Nomor : Tahun 2024
Tanggal : 5 Januari 2024
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka Tahun 2023.

**TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2023
KECAMATAN PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Hj. NUNUNG NURLAELA, M.Si.	Camat	Pembina
2.	Wawan Anwar Sutisna, S.Sos	Sekcam	Ketua Tim
3.	Dian Abdul Rohman, S.Sos	Kasubag KPEP	Sekretaris
4.	Lina Marlina A.Md,Kep.	Kasipem Yanum	Anggota
5.	Wawan Sutarta, S.AP.	Kasi Pemberdayaan & Pembangunan Masyarakat	Anggota
6.	Heni Indrayani, S.Kep.Ns	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
7.	Eros Rosilah, A.Md. Keb.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pengumpul Data
8.	Nasihin	Bendahara	Pengumpul Data
9.	Shafira Auliya	Pelaksana	Pengumpul Data

Camat Panyingkiran,



Dra. Hj. NUNUNG NURLAELA, M.Si.

14:15

4G 65



INFO SURAT DIN...

Bendahara, Bu, Deni, Kasi, ...



Bu Camat

Syukur atuh, hatur nuhun p kaside

11.06



Kasi PMD

Bu Camat

Syukur atuh, hatur nuhun p kaside

Siap Bu 🙏

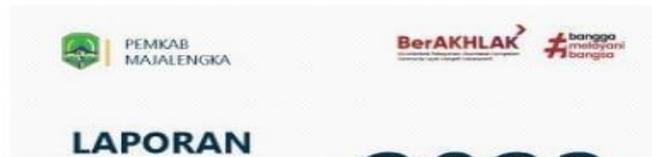
11.10

2 pesan belum dibaca



Pa Sekcam Wawan Anwar S

➔ *Diteruskan*



Lakip Kec Panyingkiran 2023..pdf

43 halaman • 6,0 MB • PDF

14.14

Pa Sekcam Wawan Anwar S

📄 Lakip Kec Panyingkiran 2023..pdf (43 halaman)

Ijin rekan2 untuk dipedomani serta tindaklanjuti. Terima kasih.

14.15



Pesan

